

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 merupakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 disusun untuk hal sebagai berikut:

- ❖ Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- ❖ Mendorong Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- ❖ Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk meningkatkan kinerjanya.

- ❖ Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1. Kedudukan

Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berkedudukan di Jakarta awalnya dikenal sebagai Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di bentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 22 Tahun 2002 tanggal 20 Juni 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta yang kemudian diperkuat oleh Keputusan Gubernur Nomor 21 Tahun 2003 tanggal 12 Januari 2003, yang selanjutnya mengalami perubahan nomenklatur menjadi Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 41 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta. Perubahan terakhir dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja pada Badan Daerah, menjadi Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta merupakan Lembaga Teknis Daerah berbentuk Kantor merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berada dibawah dan bertanggung jawab ke pada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

a) Tugas Pokok

Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam lingkup tugasnya.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta mempunyai fungsi :

- 1) Perumus kebijakan teknis sesuai bidang tugasnya ;
- 2) Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang hubungan antara lembaga, promosi serta informasi di Jakarta ;
- 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

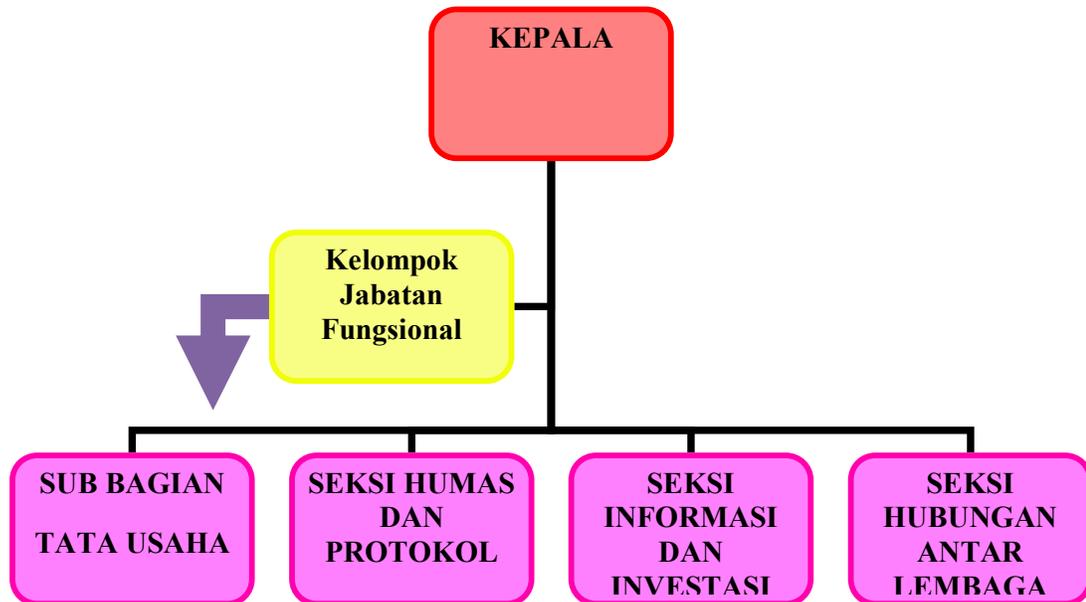
B. STRUKTUR ORGANISASI

1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta (Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2016) adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kepala Seksi Humas, Pelayanan dan Protokol;
- d. Kepala Seksi Informasi dan Investasi;
- e. Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Sesuai Perda Kep. Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016)



2. Keadaan Pegawai

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan 31 Desember 2019, Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didukung oleh pegawai sebanyak 29 (Dua puluh sembilan) orang dan 1 (satu) orang pegawai titipan, dengan rincian sebagai berikut:

No		Jabatan	Jumlah
1	Struktural	a. Kepala Badan (Eselon III.A)	1
		b. Kepala Seksi (Eselon IV.A)	4
2	Fungsional tertentu	Pranata Humas	1
		Arsiparis Mahir	1
3	Fungsional Umum	Staf	19
4	Pegawai Titipan	Staf	0
Jumlah			26

Sumber: Subbag TU Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

C. SARANA DAN PRASARANA

Selain sumber daya manusia yang ada, sebagai pendukung tugas dan fungsinya, Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki sarana dan prasarana, yaitu:

No	Jenis Sarana/Prasarana	Jumlah
1	Kendaraan roda 4	13 Unit
2	Kendaraan roda 2	4 Unit
3	Komputer yang dapat digunakan	12 Unit
4	Laptop yang dapat digunakan	8 Unit
5	iPad	2 Unit
6	AC yang dapat digunakan	23 Unit

Sumber: *Pengurus Barang Pengguna Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*

Jumlah ideal sarana dan prasarana dibandingkan dengan beban pekerjaan Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum diketahui secara pasti karena memang belum dilakukan perhitungan dan analisa terhadap kebutuhan Badan Penghubung dengan kekhususan tugas dan fungsinya sebagai Intans dengani tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam lingkup tugasnya.

D. KEUANGAN

Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun Anggaran 2019 mengelola dana APBDP sejumlah Rp19.832.687.040,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp4.143.740.040,00 dan Belanja Langsung Rp15.688.947.000,00.

E. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih terdapat keterbatasan-keterbatasan antara lain:

a. Faktor Internal Organisasi

- ❖ Belum sinkronnya status eselonisasi Badan Penghubung Provinsiantara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil;
- ❖ Masih rendahnya dukungan aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- ❖ Penganggaran yang belum sepenuhnya terarah pada fokus tupoksi Badan Penghubung dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

b. Faktor Eksternal

- ❖ Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan lembaga dan instansi lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

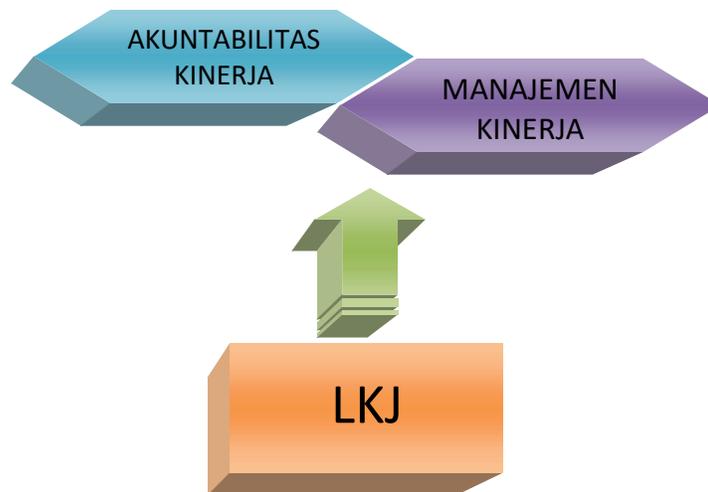
F. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Esensi dari SAKIP bagi Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus SAKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategik yang mendefinisikan visi, misi dan

tujuan/sasaran strategis Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Secara selaras dan berkelanjutan setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para *stakeholder* dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memiliki dua fungsi utama. *Pertama*, laporan kinerja merupakan sarana bagi Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Gubernur. *Kedua*, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah oleh setiap instansi pemerintah.



Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKJ Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 mencakup hal-hal sebagai berikut:

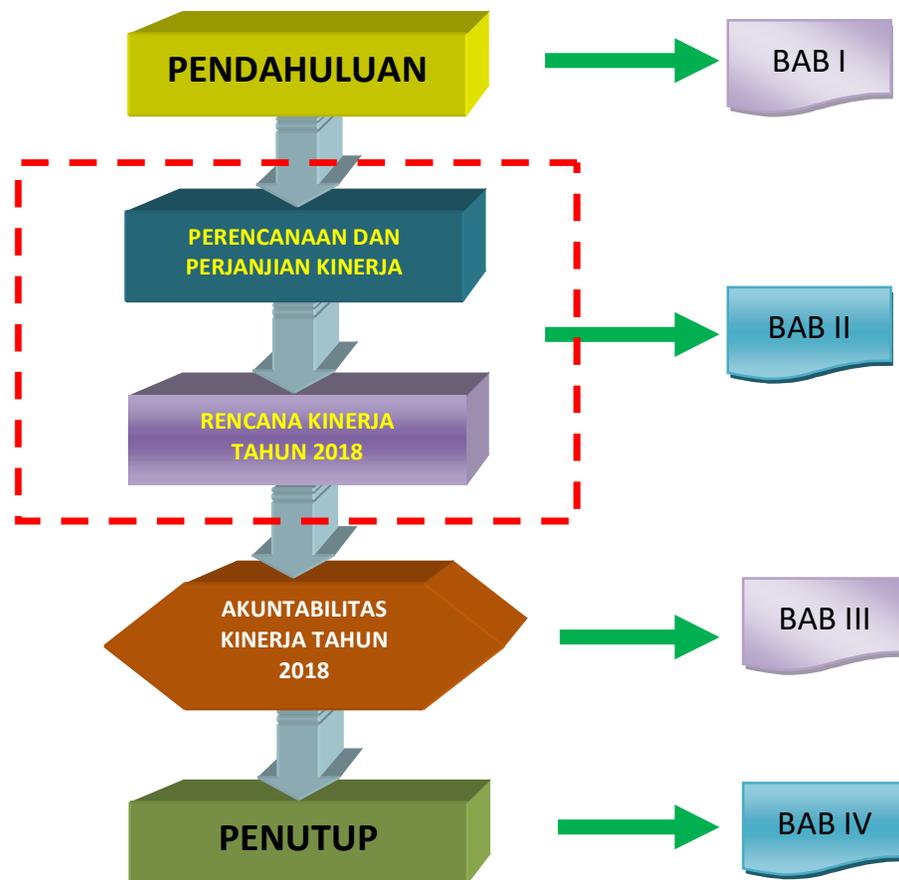
- ❖ **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKJ 2019 sebagai sarana pertanggungjawaban Badan Penghubung Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2019. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2019.

- ❖ **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKJ 2019 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

G. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama Tahun 2019. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2019 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) Tahun 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.



Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Bab I Gambaran Umum

Dalam bab ini diuraikan secara ringkas profil, struktur, fungsi dan tugas organisasi, keadaan pegawai, sarana dan prasarana, keuangan, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja serta sistematika laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2019

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab ini menguraikan:

a. Perencanaan strategis Organisasi mengenai:

Visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi serta Rencana Kinerja Tahun 2019 dalam mencapai sasaran strategis organisasi.

b. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

c. Rencana Anggaran merupakan target belanja, alokasi anggaran per sasaran strategis serta instrument pendukung Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menguraikan mengenai capaian kinerja tahun 2019, evaluasi dan analisis capaian kinerja serta realisasi anggaran tahun 2019.

Bab IV Penutup

Dalam bab ini diuraikan secara singkat simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA BADAN PENGHUBUNG

Perencanaan Kinerja dimulai dari agenda penyusunan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Dokumen penganggaran atau Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK).

1. RENCANA STRATEGIS

Visi dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 adalah ***“Babel Sejahtera, Provinsi Maju Yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”***, dengan 6 (enam) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu:

- 1. Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;***
- 2. Mewujudkan Infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas;***
- 3. Peningkatan sumber daya manusia unggul dan handal;***
- 4. Peningkatan kesehatan masyarakat;***
- 5. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik, serta pembangunan demokrasi;***
- 6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup***

Dilatar belakangi oleh kewajiban dan mengemban amanah guna mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan lima tahun ke depan, Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, memuat visi dan misi untuk panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam merealisasikan visi dan misi tersebut Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga menetapkan tujuan dan sasaran strategis yaitu:

1) Tujuan

- ❖ Meningkatnya kualitas pelayanan Badan Penghubung.

2) Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN					
				Kondisi awal 2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Sumber Daya Manusia SDM yang berkualitas dan profesional	Prosentase kelancaran dan terfasilitasinya pelayanan administrasi perkantoran serta tersedianya sarana prasarana aparatur	%	100	100	100	100	100	100
		Prosentase unsur pemerintahan dan masyarakat yang puas terhadap pelayanan serta kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Penghubung	%	100	100	100	100	100	100
2	Tersedianya bahan dan materi untuk informasi, promosi, sarana prasarana yang representatif bagi tugas pelayanan kedinasan, pendampingan keprotokolan dan hubungan antar lembaga pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Prosentase unsur pemerintah yang puas terhadap pelayanan administrasi dan informasi	%	100	100	100	100	100	100
		Prosentase unsur pemerintah yang puas terhadap pelayanan keprotokolan	%	100	100	100	100	100	100

Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

❖ Strategi

Sejalan dengan visi dan misi Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ada beberapa hal yang akan dilaksanakan Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan pendampingan keprotokolan dan kehumasan;
- b. Meningkatkan Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya Bangka Belitung di Jakarta/Luar Jakarta;
- c. Meningkatkan Kualitas Hubungan Antar Pemerintah dan Lembaga lainnya, serta melakukan Pembinaan terhadap Pelajar, Mahasiswa dan Kelompok/Organisasi Masyarakat Bangka Belitung di Jabodetabek dan daerah lainnya;

❖ Kebijakan

- Penyelenggaraan Keprotokolan dan Pelayanan Tamu serta Pimpinan Daerah sesuai dengan SOP;
- Berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya;
- Melakukan Kerjasama Peliputan Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah dengan Media Massa dan Elektronik;
- Meningkatkan Keindahan Anjungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Meningkatkan Pelaksanaan Event Seni Budaya dan Penyusunan Informasi Promosi;
- Meningkatkan Dialog/Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat;
- Meningkatkan Peran Hubungan Antar Lembaga;

2. RENCANA KINERJA TAHUN 2019

Guna merealisasikan pencapaian visi, misi dan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2017-2022, Badan Penghubung menentukan beberapa program dan kegiatan pada Rencana Kinerja Tahun 2019 dan 2018 berdasarkan skala prioritas, yaitu:

RENCANA KINERJA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
				2019	2018
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Badan Penghubung	Persentase Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung	%	80	80
2	Peningkatan Pelayanan Pemerintah	1. Persentase Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Badan Penghubung Prov.Kep. Babel	%	71	70
		2. Predikat (Nilai) SAKIP Badan Penghubung meningkat	nilai	70	65
3	Peningkatan Informasi, Investasi dan Pelayanan Serta Hubungan Antar Lembaga Penghubung Provinsi	1. Jumlah penyelenggaraan keprotokolan di Jabodetabek	Kali	22	100
		2. Jumlah koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Kali	12	-
		3. Persentase pelaksanaan peliputan kegiatan dalam rangka kehumasan dan keprotokolan melalui media masa dan elektronik	%	100	-
		1. Persentase pelaksanaan event seni budaya dan kegiatan penyusunan informasi dan promosi	%	100	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
				2019	2018
		2. Jumlah jasa konsultasi perencanaan untuk belanja rehabilitasi anjungan prov.kep.babel di TMII	Paket	1	-
		1. Jumlah dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi social dan masyarakat	Acara	2	-

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, Renja, IKU, dan DPA. Berikut Perjanjian Kinerja tahun 2019:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat dan Meningkatnya Nilai Sakip Badan Penghubung	Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai Sakip Badan Penghubung meningkat	70% dan 71	Peningkatan Pelayanan Pemerintah	12.863.352.500,00
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada	Persentase Promosi, Informasi dan Hubungan Antar Lembaga	100%	Program Peningkatan Informasi, Investasi dan Pelayanan Serta Hubungan antar	2.825.594.500,00

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
masyarakat (individu dan kelompok)	serta Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Ibukota Jakarta		Lembaga Penghubung Provinsi	
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendampingan Keprotokolan dan Kehumasan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Pejabat Daerah Yang Bertugas di Jabodetabek	1. Jumlah penyelenggaraan keprotokolan di Jabodetabek 2. Jumlah koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 3. Persentase pelaksanaan peliputan kegiatan dalam rangka kehumasan dan keprotokolan melalui media masa dan elektronik	22 kali 12 kali 100%	1. Penyelenggaraan Keprotokolan dan Pelayanan Tamu serta Pimpinan Daerah 2. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya 3. Kerjasama Peliputan Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah dengan Media Massa dan Elektronik	529.824.000,00 94.933.000,00 45.000.000,00
2. Meningkatnya Kualitas Hubungan Antar Pemerintah dan Lembaga lainnya, serta melakukan pembinaan terhadap pelajar, mahasiswa dan kelompok masyarakat Bangka Belitung di Jabodetabek dan daerah lainnya	1. Jumlah dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi social dan masyarakat	2 acara	1. Dialog/Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat	1.341.450.000,00
3. Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya Bangka Belitung di Jakarta/Luar Jakarta	1. Jumlah jasa konsultasi perencanaan untuk belanja rehabilitasi anjungan prov.kep.babel di TMII 2. Persentase pelaksanaan event seni budaya dan kegiatan penyusunan informasi dan promosi	1 100%	1. Rehabilitasi Berat Anjungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Taman Mini 2. Kegiatan Pengembangan Seni dan Budaya Daerah.	250.187.500,00 564.200.000,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Laporan kinerja Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun berdasarkan pengukuran, evaluasi kinerja dan pengungkapan secara memadai sesuai Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Tingkat capaian kinerja Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2019 dengan realisasinya, yaitu seperti formulasi sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100 \%$$

Capaian kinerja lebih lanjut dapat dinilai dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut:

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kategori Nilai Kinerja	Kode Warna
1.	≥ 91	Sangat Tinggi	■
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	■
3.	$66 \leq 75$	Sedang	■
4.	$51 \leq 65$	Rendah	■
5.	≤ 50	Sangat Rendah	■

Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Belitung sebesar 117,63% (**Sangat Tinggi**) dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian sasaran. Dari ketiga sasaran kinerja yang ditetapkan Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 dinyatakan “**berhasil**” dengan interval nilai kinerja di atas 91%.

Evaluasi dan analisa capaian kinerja Badan Penghubung sebagaimana yang telah ditetapkan, diuraikan berdasarkan sasaran pada masing-masing tujuan. Rincian capaian kinerja terlampir pada Lampiran-2. Capaian kinerja sendiri diukur dengan cara sebagai berikut:

1. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI

Dalam merealisasikan visi dan misi tersebut Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan tujuan dan sasaran strategis yaitu:

a. Tujuan 1 : **Meningkatnya kualitas pelayanan Badan Penghubung;**

Sasaran 1: Meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Sumber Daya Manusia SDM yang berkualitas dan profesional

Dalam upaya pencapaian sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan Badan Penghubung diperlukan persentase indikator untuk mengukurnya. Capaian kinerja atas sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan dan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan Pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta, tercantum pada tabel di bawah ini:

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1. Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Sumber Daya Manusia SDM yang berkualitas dan profesional	Prosentase kelancaran dan terfasilitasinya pelayanan administrasi perkantoran serta tersedianya sarana prasarana aparatur	100%	100%	100%
	Prosentase unsur pemerintahan dan masyarakat yang puas terhadap pelayanan serta kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Penghubung	100%	100%	100%
Jumlah				200%
Capaian Sasaran				100%

Sasaran 2: Tersedianya bahan dan materi untuk informasi, promosi, sarana prasarana yang representatif bagi tugas pelayanan kedinasan, pendampingan keprotokolan dan hubungan antar lembaga pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
2. Tersedianya bahan dan materi untuk informasi, promosi, sarana prasarana yang representatif bagi tugas pelayanan kedinasan, pendampingan keprotokolan dan hubungan antar lembaga pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Prosentase unsur pemerintah yang puas terhadap pelayanan administrasi dan informasi	100%	100%	100%
	Prosentase unsur pemerintah yang puas terhadap pelayanan keprotokolan	100%	100%	100%
Jumlah				200%
Capaian Sasaran				100%

Indikator Kinerja 1 : Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai Sakip Badan Penghubung meningkat

Target Kinerja Tahun 2019:

Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai Sakip Badan Penghubung sebesar 70% dan 71.

Pengukuran Kinerja Tahun 2019

Indikator	Pengukuran	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	71%	78,24%	110,20%
	Jumlah Pelayanan Kesekretariatan			
Nilai Sakip Badan Penghubung	Nilai Sakip	70		
Jumlah				110,20%
Capaian Sasaran				110,20%

Indikator Kinerja 2 : Persentase Promosi, Informasi dan Hubungan Antar Lembaga serta Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Ibukota Jakarta

Target Kinerja Tahun 2019:

Persentase Promosi, Informasi dan Hubungan Antar Lembaga serta Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Ibukota Jakarta adalah sebesar 100% yang terdiri dari 3 sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendampingan Keprotokolan dan Kehumasan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Pejabat Daerah Yang Bertugas di Jabodetabek;
2. Meningkatnya Kualitas Hubungan Antar Pemerintah dan Lembaga lainnya, serta melakukan pembinaan terhadap pelajar, mahasiswa dan kelompok masyarakat Bangka Belitung di Jabodetabek dan daerah lainnya;
3. Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya Bangka Belitung di Jakarta/Luar Jakarta.

Pengukuran Kinerja Tahun 2019

Pada Tahun 2019 dari penilaian Persentase Promosi, Informasi dan Hubungan Antar Lembaga serta Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Ibukota Jakarta. Hasil pengukuran capaian kinerja tercantum pada tabel di bawah ini:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendampingan Keprotokolan dan Kehumasan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Pejabat Daerah Yang Bertugas di Jabodetabek

Indikator	Pengukuran	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah penyelenggaraan keprotokolan di Jabodetabek	Jumlah Penyelenggaraan Keprotokolan di Jabodetabek yang terlaksana	22 kali	41 kali	195,24%
Jumlah koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Jumlah koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya yang terlaksana	12 kali	11 kali	91,67%
Persentase pelaksanaan peliputan kegiatan dalam rangka kehumasan dan keprotokolan melalui media masa dan elektronik	Jumlah Peliputan Kegiatan dalam Rangka Kehumasan dan Keprotokolan melalui Media Massa dan Elektronik yang dilaksanakan dibagi Jumlah Pelaksanaan Peliputan Kegiatan dalam Rangka Kehumasan dan Keprotokolan melalui Media Massa dan Elektronik	100%	33%	33%
Jumlah				319,90%
Capaian Sasaran				106,63%

2. Meningkatnya Kualitas Hubungan Antar Pemerintah dan Lembaga lainnya, serta melakukan pembinaan terhadap pelajar, mahasiswa dan kelompok masyarakat Bangka Belitung di Jabodetabek dan daerah lainnya

Indikator	Pengukuran	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi social dan masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Dialog/Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat	2 acara	2 acara	100%
Jumlah				100%
Capaian Sasaran				100%

3. Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya Bangka Belitung di Jakarta/Luar Jakarta

Indikator	Pengukuran	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pelaksanaan event seni budaya dan kegiatan penyusunan informasi dan promosi	Jumlah Pelaksanaan Event Seni Budaya dan Kegiatan Penyusunan Informasi dan Promosi yang terlaksana dibagi Jumlah Event Seni Budaya dan Kegiatan Penyusunan Informasi dan Promosi	100%	100%	100%
Jumlah jasa konsultansi perencanaan untuk belanja rehabilitasi anjungan prov.kep.babel di TMII	Jumlah Jasa Konsultansi Perencanaan untuk Belanja Rehabilitasi Anjungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terlaksana	1 jasa konsultan	1 jasa konsultan	100%
Jumlah				200%
Capaian Sasaran				100%

**Tabel Pengukuran Capaian Kinerja
Persentase Promosi, Informasi dan Hubungan Antar Lembaga serta Pelayanan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Ibukota Jakarta
Tahun 2019**

Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Tahun 2019	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian Tahun 2019	Target Akhir Renstra
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendampingan Keprotokolan dan Kehumasan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Pejabat Daerah Yang Bertugas di Jabodetabek	Persentase Kualitas Pelayanan Pendampingan Keprotokolan dan Kehumasan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Pejabat Daerah Yang Bertugas di Jabodetabek	100%	100%	106,63%	106,63%	100,00%
2. Meningkatnya Kualitas Hubungan Antar Pemerintah dan Lembaga lainnya, serta melakukan pembinaan terhadap pelajar, mahasiswa dan kelompok masyarakat Bangka Belitung di Jabodetabek dan daerah lainnya	Persentase Kualitas Hubungan Antar Pemerintah dan Lembaga lainnya, serta melakukan pembinaan terhadap pelajar, mahasiswa dan kelompok masyarakat Bangka Belitung di Jabodetabek dan daerah lainnya	83,33%	100%	100%	100%	100%
3. Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya Bangka Belitung di Jakarta/Luar Jakarta	Persentase Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya Bangka Belitung di Jakarta/Luar Jakarta	90,17%	100%	100%	100%	100%
Jumlah					306,63	
Capaian Sasaran					102,21%	

2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN LALU

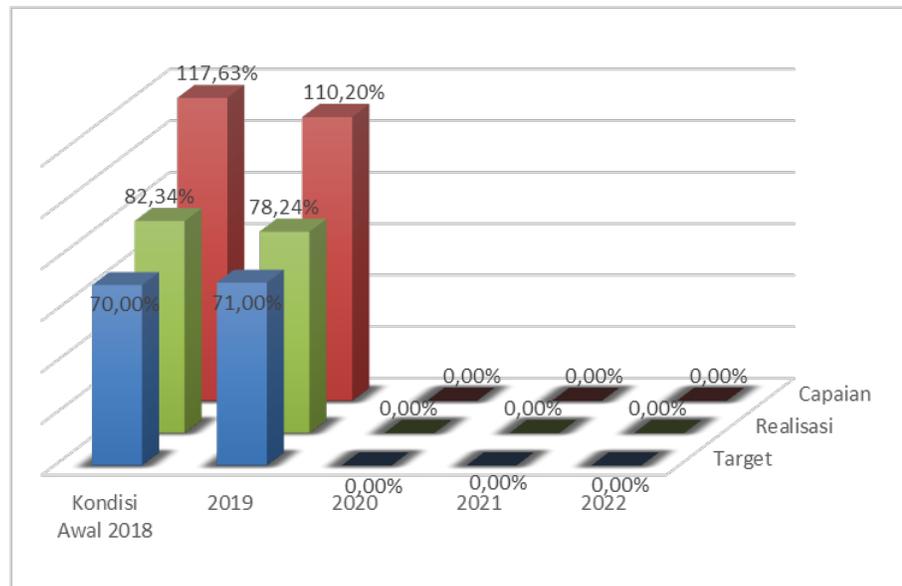
a. Nilai Kepuasan Pelayanan Sekretariat Badan Penghubung

Capain kinerja Nilai Kepuasan Pelayanan Sekretariat Badan Penghubung

Tabel Perbandingan Nilai Kepuasan Pelayanan Sekretariat Badan Penghubung dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2017	0,00	0,00	0,00
2018	70,00	82,34	117,63%
2019	71,00	78,24	110,20%

Grafik tingkat capaian Nilai Kepuasan Pelayanan Sekretariat Badan Penghubung



Berdasarkan grafik tersebut jika dibandingkan dengan tahun 2018 terdapat penurunan capaian sasaran kinerja Nilai Kepuasan Pelayanan Sekretariat Badan Penghubung sebesar 7,43%.

Nilai Kepuasan Pelayanan Sekretariat Badan Penghubung menjadi salah satu indikator terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas terhadap Renstra Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.

b. Persentase Kualitas Pelayanan Pendampingan Keprotokolan dan Kehumasan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Pejabat Daerah Yang Bertugas di Jabodetabek

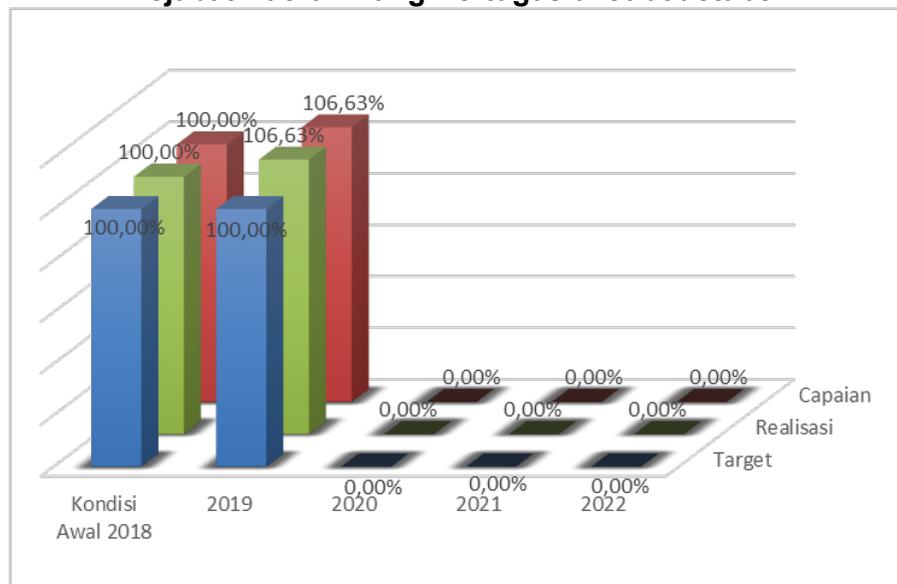
Tabel Perbandingan Capaian Persentase Kualitas Pelayanan Pendampingan Keprotokolan dan Kehumasan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Pejabat Daerah Yang Bertugas di Jabodetabek

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2017	0,00	0,00	0,00
2018	100,00	100	100%
2019	100,00	106,63	106,63%

Dilihat dari tabel di atas diketahui bahwa semakin meningkatnya kinerja Pelayanan Pendampingan Keprotokolan dan Kehumasan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Pejabat Daerah Yang Bertugas di Jabodetabek.

Adapun grafik tingkat kepuasan Pelayanan Pendampingan Keprotokolan dan Kehumasan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Pejabat Daerah Yang Bertugas di Jabodetabek, sebagai berikut:

Grafik tingkat kepuasan Pelayanan Pendampingan Keprotokolan dan Kehumasan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Pejabat Daerah Yang Bertugas di Jabodetabek



Berdasarkan grafik tersebut jika dibandingkan dengan tahun 2018 terdapat

kenaikan capaian sasaran kinerja sebesar 6,63%.

- c. **Persentase Kualitas Hubungan Antar Pemerintah dan Lembaga lainnya, serta melakukan pembinaan terhadap pelajar, mahasiswa dan kelompok masyarakat Bangka Belitung di Jabodetabek dan daerah lainnya**

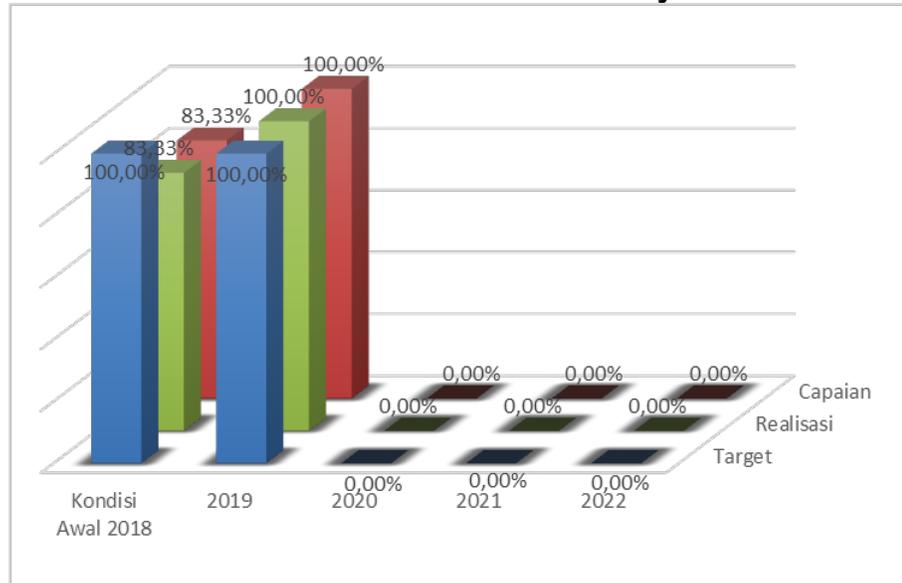
Tabel Perbandingan Capaian Persentase Kualitas Hubungan Antar Pemerintah dan Lembaga lainnya, serta melakukan pembinaan terhadap pelajar, mahasiswa dan kelompok masyarakat Bangka Belitung di Jabodetabek dan daerah lainnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2017	0,00	0,00	0,00
2018	100,00	83,33	83,33%
2019	100,00	100,00	100%

Dilihat dari tabel di atas diketahui bahwa meningkatnya Persentase Kualitas Hubungan Antar Pemerintah dan Lembaga lainnya, serta melakukan pembinaan terhadap pelajar, mahasiswa dan kelompok masyarakat Bangka Belitung di Jabodetabek dan daerah lainnya sesuai harapan yang ditargetkan.

Adapun grafik tingkat Persentase Kualitas Hubungan Antar Pemerintah dan Lembaga lainnya, serta melakukan pembinaan terhadap pelajar, mahasiswa dan kelompok masyarakat Bangka Belitung di Jabodetabek dan daerah lainnya, sebagai berikut:

Grafik tingkat Persentase Kualitas Hubungan Antar Pemerintah dan Lembaga lainnya, serta melakukan pembinaan terhadap pelajar, mahasiswa dan kelompok masyarakat Bangka Belitung di Jabodetabek dan daerah lainnya

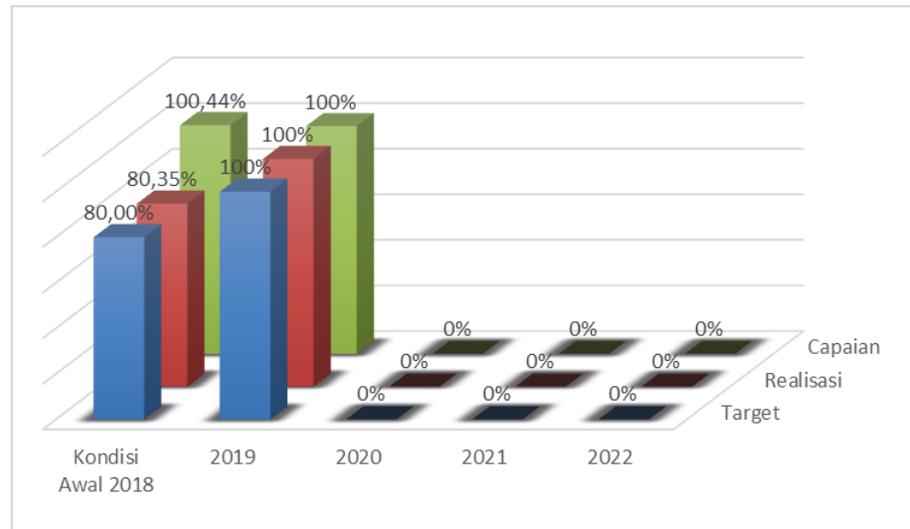


d. Persentase Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya Bangka Belitung di Jakarta/Luar Jakarta

Tabel Capaian Kinerja Persentase Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya Bangka Belitung di Jakarta/Luar Jakarta

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2017	0,00	0,00	0,00
2018	80,00	80,35	100,44%
2019	100,00	100,00	100,00

Grafik Tingkat Capaian Kinerja Persentase Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya Bangka Belitung di Jakarta/Luar Jakarta



Capaian kinerja tahun 2019 seperti tampak pada tabel dan grafik di atas mendapat kategori “Sangat Tinggi”, namun dibandingkan dengan tahun sebelumnya menurun sebesar 0,44%.

3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

a. Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan Badan Penghubung.

Sasaran : Meningkatkan kualitas pelayanan dan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan profesional.

1) Indikator Kinerja 1 : Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai Sakip Badan Penghubung meningkat

Berdasarkan Penilaian kepuasan pada Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas di Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Tahun 2019 sebesar 78,24%, sementara target awal Renstra Tahun 2019 yang ditetapkan sebesar 71%, sehingga capaian kinerja tahun 2019 sebesar 110,20%.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian Tahun 2019
Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	71,00	78,24	110,20%

2) Indikator Kinerja 2 : Persentase Promosi, Informasi dan Hubungan Antar Lembaga serta Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Ibukota Jakarta

Pengukuran kinerja Tahun 2019 atas Persentase Promosi, Informasi dan Hubungan Antar Lembaga serta Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Ibukota Jakarta ditarget sebesar 100,00% dengan realisasi sebesar 102,21%. Adapun gambaran perbandingan dengan jangka menengah tercantum pada tabel di bawah ini:

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019
Dengan Target Jangka Menengah**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian Tahun 2019
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendampingan Keprotokolan dan Kehumasan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Pejabat Daerah Yang Bertugas di Jabodetabek	Persentase Pejabat Daerah Yang Puas Terhadap Pelayanan dan Keprotokolan Yang Diberikan Badan Penghubung	100,00%	102,21%	102,21%

4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN

- a. Dengan telah diadakannya pengukuran Nilai Kepuasan Pelayanan Sekretariat Badan Penghubung, dapat diketahui capaian Nilai Kepuasan Pelayanan Sekretariat Badan Penghubung yang sudah melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2019 yaitu 110,20%. Hal tersebut tak lepas dari upaya dan komitmen Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.
- b. Hasil jumlah Persentase Kualitas Pelayanan Pendampingan Keprotokolan dan Kehumasan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Pejabat Daerah Yang Bertugas di Jabodetabek memperoleh capaian 106,63%.
- c. Hasil jumlah Persentase Kualitas Hubungan Antar Pemerintah dan Lembaga lainnya, serta melakukan pembinaan terhadap pelajar, mahasiswa dan kelompok masyarakat Bangka Belitung di Jabodetabek dan daerah lainnya, memperoleh nilai capaian sebesar 100% dari target 100% yang ditetapkan untuk Tahun 2019, hal tersebut dikarenakan terealisasinya pelaksanaan 2 acara yang di targetkan yaitu acara buka puasa bersama dan halal bihalal.
- d. Hasil jumlah Persentase Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya Bangka Belitung di Jakarta/Luar Jakarta, dengan capaian kinerja sebesar 100% Kendala dan hambatan diantaranya:
 - Kemampuan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas yang membidangi pelayanan, informasi, promosi, seni budaya dan wisata masih kurang;
 - Kurangnya jumlah koleksi seni budaya Bangka Belitung;
 - Anjungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di TMII tergolong bangunan yang sudah melebihi umur ekonomisnya, sehingga diperlukan pemugaran/rehab untuk lebih menarik para pengunjung, serta dari segi luas bangunan tergolong kecil bila di bandingkan dengan anjungan-anjungan provinsi lain yang ada di TMII.

5. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sumber daya yang digunakan dalam menganalisa efisiensi capaian kinerja dibatasi dari anggaran kegiatan saja. Dalam menganalisa efisiensi penggunaan sumber daya digunakan persamaan sebagai berikut:

$$E/I = ((\text{Anggaran Kegiatan} / \text{Target Kinerja}) \times \text{Realisasi Kinerja}) - \text{Realisasi anggaran}$$

Keterangan:

E/I = Efisiensi atau inefisiensi

Kategori efisien atau inefisiensi bukan batasan adanya kerugian Negara atas pemakaian/penggunaan sumber daya keuangan, namun sebagai bahan pertimbangan dalam pemakaian/penggunaan anggaran belanja atas *output* atau *outcome* yang dihasilkan.

a. Nilai Kepuasan Pelayanan Sekretariat Badan Penghubung

Nilai Kepuasan Pelayanan Sekretariat Badan Penghubung menggunakan anggaran kegiatan Peningkatan Pelayanan Pemerintah sebesar Rp12.863.352.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp10.118.100.233,00 atau 78,66%. Efisiensi penggunaan sumber daya untuk capaian Nilai Kepuasan Pelayanan Sekretariat Badan Penghubung adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} E/I &= ((\text{Rp}12.863.352.500,00 / 71) \times 78,24) - \text{Rp}10.118.100.233,00 \\ &= \text{Rp}4.056.951.874,04 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari Nilai Kepuasan Pelayanan Sekretariat Badan Penghubung dapat dikatakan efisiensinya sebesar Rp4.056.951.874,04. Hal ini disebabkan karena adanya program rasionalisasi anggaran, diantaranya yaitu kegiatan Penyediaan Jasa Konsultasi Perencanaan untuk Rehabilitasi Berat Asrama Dayang Putri Bangka Belitung di Yogyakarta sebesar Rp50.187.500,00.

Adanya efisiensi penggunaan sumber daya tersebut diharapkan agar hasil capaian Nilai Kepuasan Pelayanan Sekretariat Badan Penghubung dipertahankan atau lebih ditingkatkan.

b. Persentase Promosi, Informasi dan Hubungan Antar Lembaga serta Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Ibukota Jakarta

Capaian kinerja dari indikator Persentase Promosi, Informasi dan Hubungan Antar Lembaga serta Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Ibukota Jakarta, pada tahun anggaran 2019 didukung oleh anggaran kegiatan sebesar Rp2.825.594.500,00 dan realisasi sebesar Rp2.253.246.537,00 yang terdiri dari enam kegiatan.

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk capaian Persentase Promosi, Informasi dan Hubungan Antar Lembaga serta Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Ibukota Jakarta adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} E/I &= ((Rp2.825.594.500,00 / 100) \times 102,21) - Rp2.253.246.537,00 \\ &= Rp634.793.601,45 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari Persentase Promosi, Informasi dan Hubungan Antar Lembaga serta Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Ibukota Jakarta dapat dikatakan efisiensi sebesar Rp634.793.601,45. Hal ini disebabkan karena diantaranya adanya program rasionalisasi anggaran, diantaranya yaitu kegiatan Rehabilitasi Berat Anjungan Prov.Kep. Bangka Belitung di TMII sebesar Rp1.036.377.500,00. Adanya efisiensi penggunaan sumber daya tersebut diharapkan agar hasil capaian kinerja dari Persentase Promosi, Informasi dan Hubungan Antar Lembaga serta Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Ibukota Jakarta dipertahankan atau lebih ditingkatkan.

6. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN

Pelaksanaan program dan kegiatan merupakan strategi dan cara guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2017-2022, Rencana Kinerja Tahun 2019 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2019 guna mencapai tujuan dan sasaran yaitu:

a. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah

1) Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan merupakan kegiatan rutin Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai tugas dan fungsinya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Badan Penghubung.

Dalam usaha mencapai sasaran meningkatkan kualitas pelayanan Badan Penghubung dengan indikator kinerja berupa Persentase Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung, telah dilakukan upaya-upaya dalam Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Untuk kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran telah dianggarkan dana sebesar Rp5.747.577.500,00 yang dibebankan pada APBDP Tahun Anggaran 2019 dengan realisasi capaian keuangan sebesar Rp4.873.986.074,00.

2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan sarana dan prasarana aparatur.

Untuk kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dianggarkan dana sebesar Rp7.006.725.000,00 dengan realiasi penggunaan anggaran dan dipertanggungjawabkan sebesar Rp5.207.263.959,00.

3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas dan sumber daya aparatur pada Badan Penghubung, berupa kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS.

Untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dianggarkan sebesar Rp100.450.000,00 dengan realisasi yang sudah dipertanggungjawabkan sebesar Rp34.150.200,00.

Keluaran dari Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur adalah jumlah aparatur perangkat daerah yang meningkat kualitas dan kapasitasnya.

4) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dilaksanakan untuk tersedianya dokumen renja PD tahun 2020 dan perubahan renja PD tahun 2019.

Untuk kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dianggarkan dana APBDP TA 2019 sebesar Rp2.200.000,00 dengan realisasi penggunaan dana dan dipertanggungjawabkan sebesar Rp400.000,00.

Keluaran dari kegiatan ini adalah Renja PD 2020 dan Renja Perubahan PD 2019.

5) Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan untuk tersedianya data capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah.

Untuk kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dianggarkan dana APBDP TA 2019 sebesar Rp6.400.000,00

dengan realisasi penggunaan dana dan dipertanggungjawabkan sebesar Rp2.300.000,00.

Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah yang di buat.

b. Program Peningkatan promosi, Informasi dan Pelayanan serta Hubungan antar Lembaga

1) Penyelenggaraan Keprotokolan dan Pelayanan Tamu serta Pimpinan Daerah

Kegiatan Penyelenggaraan Keprotokolan dan Pelayanan Tamu serta Pimpinan Daerah dilaksanakan dalam rangka untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendampingan Keprotokolan dan Kehumasan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Pejabat Daerah Yang Bertugas di Jabodetabek.

Untuk Kegiatan Penyelenggaraan Keprotokolan dan Pelayanan Tamu serta Pimpinan Daerah dianggarkan dana sebesar Rp 529.824.000,00 dengan realisasi penggunaan dana dan dipertanggungjawabkan sebesar Rp 388.719.000,00.

Keluaran dari Kegiatan Penyelenggaraan Keprotokolan dan Pelayanan Tamu serta Pimpinan Daerah pada Tahun 2019 adalah jumlah penyelenggaraan keprotokolan di Jabodetabek.

2) Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendampingan Keprotokolan dan Kehumasan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Pejabat Daerah Yang Bertugas di Jabodetabek.

Untuk Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya dianggarkan dana sebesar Rp 94.933.000,00 dengan

realisasi penggunaan dana dan dipertanggungjawabkan sebesar Rp61.462.164,00.

Keluaran dari Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya adalah jumlah pendampingan kepala daerah/wakil kepala daerah.

3) Dialog/Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat

Kegiatan Dialog/Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat dilaksanakan untuk Meningkatkan Kualitas Hubungan Antar Pemerintah dan Lembaga lainnya, serta melakukan pembinaan terhadap pelajar, mahasiswa dan kelompok masyarakat Bangka Belitung di Jabodetabek dan daerah lainnya.

Untuk Kegiatan Dialog/Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat dianggarkan dana sebesar Rp1.341.450.000,00 dengan realisasi penggunaan dana dan dipertanggungjawabkan sebesar Rp 1.240.446.818,00.

Keluaran dari Kegiatan tersebut adalah jumlah kegiatan Dialog/Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat adalah jumlah Dialog/Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat.

4) Rehabilitasi Berat Anjungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Taman Mini

Kegiatan Rehabilitasi Berat Anjungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Taman Mini dilaksanakan untuk meningkatkan Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya Bangka Belitung di Jakarta/Luar Jakarta.

Untuk Kegiatan Rehabilitasi Berat Anjungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Taman Mini dianggarkan dana sebesar Rp 250.187.500,00 dengan realisasi penggunaan dana dan dipertanggungjawabkan sebesar Rp 99.990.000,00.

Keluaran dari Kegiatan tersebut adalah Jasa konsultasi Perencanaan rehabilitasi berat.

5) Kegiatan Pengembangan Seni dan Budaya Daerah

Kegiatan Pengembangan Seni dan Budaya Daerah dilaksanakan untuk meningkatkan Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya Bangka Belitung di Jakarta/Luar Jakarta.

Untuk Kegiatan Pengembangan Seni dan Budaya Daerah dianggarkan dana sebesar Rp 564.200.000,00 dengan realisasi penggunaan dana dan dipertanggungjawabkan sebesar Rp 446.828.555,00.

Keluaran dari kegiatan Pengembangan Seni dan Budaya Daerah adalah meningkatnya pelaksanaan event seni budaya dan kegiatan penyusunan informasi dan promosi.

6) Kerjasama Peliputan Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah dengan Media Massa dan Elektronik

Kegiatan Kerjasama Peliputan Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah dengan Media Massa dan Elektronik.

Untuk Kegiatan Kerjasama Peliputan Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah dengan Media Massa dan Elektronik dianggarkan dana sebesar Rp45.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana dan dipertanggungjawabkan sebesar Rp15.800.000,00. Keluaran dari Kegiatan ini adalah terlaksananya peliputan kegiatan dalam rangka kehumasan dan keprotokolan melalui media masa dan elektronik.

B. REALISASI ANGGARAN

Pencapaian realisasi keuangan merupakan akuntabilitas keuangan dalam rangka membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana APBD Induk dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019 guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022, Rencana Kinerja Tahun 2019 dan Penetapan Kinerja Tahun 2019.

Realisasi Keuangan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pencapaian Kinerja Tahun 2019

No	Program dan Kegiatan	APBD-P	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
a. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah						
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.747.577.500,00	4.873.986.074,00	84,80	873.591.426,00	15,20
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7.006.725.000,00	5.207.263.959,00	74,32	1.799.461.041,00	25,68
3.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.450.000,00	34.150.200,00	34,00	66.299.800,00	66,00
4.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	2.200.000,00	400.000,00	18,18	1.800.000,00	81,82
5.	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6.400.000,00	2.300.000,00	35,94	4.100.000,00	64,06
b. Program Peningkatan promosi, Informasi dan Pelayanan serta Hubungan antar Lembaga						
6.	Penyelenggaraan Keprotokolan dan Pelayanan Tamu serta Pimpinan Daerah	529.824.000,00	388.719.000,00	73,37	141.105.000,00	26,63
7.	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	94.933.000,00	61.462.164,00	64,74	33.470.836,00	35,26

No	Program dan Kegiatan	APBD-P	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
8.	Dialog/Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat	1.341.450.000,00	1.240.446.818,00	92,47	101.003.182,00	7,53
9.	Rehabilitasi Berat Anjungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Taman Mini	250.187.500,00	99.990.000,00	39,97	150.197.500,00	60,03
10.	Kegiatan Pengembangan Seni dan Budaya Daerah	564.200.000,00	446.828.555,00	79,20	117.371.445,00	20,80
11.	Kerjasama Peliputan Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah dengan Media Massa dan Elektronik	45.000.000,00	15.800.000,00	35,11	29.200.000,00	64,89

Sumber: Simda Keuangan Badan Penghubung Provinsi Kep. Bangka Belitung

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan utama yang terkait dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019, yaitu:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dapat diselenggarakan dengan baik dan sebagaimana mestinya.
2. Kepala Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta jajaran telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan kinerja Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewajiban seperti yang disebutkan pada point 1 dan point 2 dapat diperoleh dari data indikator kinerja.
4. Pencapaian sasaran strategis telah menunjukkan kinerja yang cukup baik walaupun masih belum maksimal seperti yang diharapkan. Keberhasilan tersebut karena adanya kerjasama dan komitmen semua pihak yang terkait dalam rangka mensukseskan program-program yang telah direncanakan sebelumnya.